



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN POSTUR DAN RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

MEMUTUSKAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN POSTUR
DAN RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, dilakukan perubahan terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- (2) Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan rincian besaran:
 - a. Anggaran Pendapatan Negara;
 - b. Anggaran Belanja Negara;
 - c. Surplus/defisit anggaran; dan
 - d. Pembiayaan Anggaran.
- (3) Anggaran Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperkirakan sebesar Rp1.760.883.901.130.000,00 (satu kuadriliun tujuh ratus enam puluh triliun delapan ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari sumber:
 - a. penerimaan Perpajakan diperkirakan sebesar Rp1.462.629.688.832.000,00 (satu kuadriliun empat ratus enam puluh dua triliun enam ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - b. penerimaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- b. penerimaan Negara Bukan Pajak diperkirakan sebesar Rp297.755.472.298.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh triliun tujuh ratus lima puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah); dan
 - c. penerimaan Hibah diperkirakan sebesar Rp498.740.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperkirakan sebesar Rp2.613.819.877.869.000,00 (dua kuadriliun enam ratus tiga belas triliun delapan ratus sembilan belas miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat diperkirakan sebesar Rp1.851.101.008.789.000,00 (satu kuadriliun delapan ratus lima puluh satu triliun seratus satu miliar delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), termasuk tambahan belanja untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebesar Rp255.110.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima triliun seratus sepuluh miliar rupiah); dan
 - b. Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa diperkirakan sebesar Rp762.718.869.080.000,00 (tujuh ratus enam puluh dua triliun tujuh ratus delapan belas miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diperkirakan sebesar Rp852.935.976.739.000,00 (delapan ratus lima puluh dua triliun sembilan ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. pembiayaan utang;
 - b. pembiayaan investasi;
 - c. pemberian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- c. pemberian pinjaman;
- d. kewajiban penjaminan; dan
- e. pembiayaan lainnya.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf a diutamakan penggunaannya dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dengan fokus pada belanja:
 - a. kesehatan;
 - b. jaring pengaman sosial; dan
 - c. pemulihan perekonomian.
- (2) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf b dapat digunakan antara lain untuk jaring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Pasal 3

- (1) Rincian Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 berupa Anggaran Pendapatan Negara, Anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(2) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- (2) Dalam hal diperlukan, Menteri Keuangan dapat menetapkan perubahan atas rincian Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah berkonsultasi dengan Presiden.

Pasal 4

- (1) Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf a ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Rincian Anggaran Pendidikan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Dana Abadi investasi pemerintah di bidang Pendidikan sebesar Rp29.000.000.000.000,00 (dua puluh sembilan triliun rupiah) untuk:
 - a. Pengembangan pendidikan nasional;
 - b. Penelitian;
 - c. Kebudayaan; dan
 - d. Perguruan tinggi.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, skema, dan cakupan bidang yang dapat dibiayai menggunakan hasil pengelolaan Dana Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 6 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 6

- (1) Perubahan rincian dari Anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa:
- a. pergeseran pagu anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan/atau antarprogram dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
 - b. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak termasuk penggunaan saldo kas Badan Layanan Umum;
 - c. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman termasuk pinjaman luar negeri baru untuk penanggulangan bencana alam;
 - d. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari hibah termasuk hibah yang diterushibahkan;
 - e. perubahan anggaran belanja dalam rangka penanggulangan bencana alam;
 - f. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari klaim asuransi Barang Milik Negara pada kementerian negara/lembaga tertentu;
 - g. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara untuk pembiayaan kegiatan/proyek Kementerian Negara/Lembaga termasuk penggunaan sisa dana penerbitan Surat Berharga Syariah Negara yang tidak terserap pada tahun 2019;
 - h. perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa perubahan pagu untuk pengesahan belanja yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri yang telah *closing date*;
 - i. perubahan pembayaran program pengelolaan subsidi berdasarkan perubahan asumsi dasar ekonomi makro, perubahan parameter, dan/atau pembayaran kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya;
 - j. perubahan...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- j. perubahan pembayaran investasi pada organisasi/lembaga keuangan internasional/badan usaha internasional sebagai akibat dari perubahan kurs;
- k. perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa penambahan pagu karena luncuran Rupiah Murni Pendamping DIPA Tahun 2019 yang tidak terserap untuk pembayaran uang muka kontrak kegiatan yang dibiayai pinjaman luar negeri;
- l. perubahan/tambahan kewajiban yang timbul dari penggunaan dana Saldo Anggaran Lebih, Penarikan Pinjaman Tunai, penerbitan Surat Berharga Negara dan/atau pemanfaatan saldo kas Badan Layanan Umum sebagai akibat tambahan pembiayaan;
- m. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk penanggulangan bencana alam;
- n. pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) untuk pemberian bantuan dan/atau hibah kepada pemerintah daerah dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau kebijakan stimulus fiskal dalam rangka mengurangi dampak ekonomi;
- o. pergeseran Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN), atau antar keperluan dalam Bagian Anggaran 999.08;
- p. pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari Penerimaan Negara Bukan Pajak antar satuan kerja dalam 1 (satu) program yang sama atau antarprogram dalam satu Bagian Anggaran;
- q. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional;
- r. pergeseran . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- r. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang tidak diperkenankan (*ineligible expenditure*) atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
- s. pergeseran anggaran antar program dalam rangka penyelesaian restrukturisasi Kementerian Negara/Lembaga;
- t. realokasi anggaran bunga utang sebagai dampak dari perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal; dan
- u. pergeseran anggaran dalam satu atau antar Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau antar kewenangan untuk kegiatan dalam rangka tugas pembantuan, urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi,

ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- (2) Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan rincian anggaran yang disebabkan oleh penambahan atau pengurangan anggaran belanja kementerian negara/lembaga dan/atau Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara termasuk pergeseran rincian anggarannya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perubahan rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 7

Perubahan rincian anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa antara lain berupa:

- a. Penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil yang dilakukan berdasarkan perkembangan perekonomian dan/atau penerimaan negara;

b. Penyesuaian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- b. Penyesuaian alokasi Dana Alokasi Umum menurut daerah berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan;
- c. Penambahan/pengurangan alokasi Dana Transfer Khusus, pengalihan alokasi antar bidang/subbidang Dana Alokasi Khusus Fisik atau penyesuaian penggunaan Dana Transfer Khusus karena kondisi tertentu yang membutuhkan anggaran mendesak;
- d. Penyesuaian alokasi Dana Insentif Daerah;
- e. Penyesuaian alokasi Dana Otonomi Khusus mengikuti perubahan alokasi Dana Alokasi Umum;
- f. Penyesuaian alokasi Dana Desa;
- g. Pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan
- h. Perbaikan data dan salah hitung,
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 8

- (1) Perubahan rincian dari Pembiayaan Anggaran yang berasal dari perubahan pagu Pemberian Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah sebagai akibat dari:
 - a. penambahan pagu Pemberian Pinjaman karena percepatan atau lanjutan penarikan;
 - b. penambahan pagu Pemberian Pinjaman di tahun anggaran 2019 yang tidak terserap;
 - c. pengurangan pagu Pemberian Pinjaman; dan/atau
 - d. pengesahan atas Pemberian pinjaman luar negeri yang telah *closing date*,
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara perubahan pagu Pemberian Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 9 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Pasal 9

Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dan rincian Pembiayaan Anggaran termasuk perubahannya menjadi dasar penyusunan dan pengesahan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat pembentukan dan/atau perubahan Kementerian Negara/Lembaga, penyesuaian terhadap rincian alokasi anggaran ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Penyesuaian terhadap rincian alokasi anggaran sebagai akibat pembentukan dan/atau perubahan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pergeseran alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf a.
- (3) Rincian alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Presiden ini berlaku, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2020
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2020
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 94

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Departemen Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



[Handwritten signature]
Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN POSTUR DAN RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN
ANGGARAN 2020

LAMPIRAN
POSTUR PERUBAHAN APBN TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan rupiah)

| | | Semula | Menjadi |
|-----------|--|--------------------------|--------------------------|
| A. | PENDAPATAN NEGARA | 2.233.196.701.660 | 1.760.883.901.130 |
| I. | PENERIMAAN DALAM NEGERI | 2.232.697.961.660 | 1.760.385.161.130 |
| 1. | PENERIMAAN PERPAJAKAN | 1.865.702.816.382 | 1.462.629.688.832 |
| 2. | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | 366.995.145.278 | 297.755.472.298 |
| II. | PENERIMAAN HIBAH | 498.740.000 | 498.740.000 |
| B. | BELANJA NEGARA | 2.540.422.500.559 | 2.613.819.877.869 |
| I. | BELANJA PEMERINTAH PUSAT | 1.683.477.179.135 | 1.851.101.008.789 |
| II. | TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA | 856.945.321.424 | 762.718.869.080 |
| C. | KESEIMBANGAN PRIMER | -12.012.458.899 | -517.779.676.739 |
| D. | SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B) | -307.225.798.899 | -852.935.976.739 |
| | <i>% Defisit Anggaran terhadap PDB</i> | -1,76 | -5,07 |
| E. | PEMBIAYAAN ANGGARAN | 307.225.798.899 | 852.935.976.739 |
| I. | PEMBIAYAAN UTANG | 351.853.256.250 | 1.006.400.481.800 |
| II. | PEMBIAYAAN INVESTASI | -74.229.874.207 | -229.324.135.317 |
| III. | PEMBERIAN PINJAMAN | 5.192.999.856 | 5.810.213.256 |
| IV. | KEWAJIBAN PENJAMINAN | -590.583.000 | -590.583.000 |
| V. | PEMBIAYAAN LAINNYA | 25.000.000.000 | 70.640.000.000 |

ALOKASI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

LAMPIRAN
RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan rupiah)

| | | SEMULA | MENJADI |
|---------------|---|------------------------|--------------------------|
| | ALOKASI PEMBIAYAAN ANGGARAN | 307.225.798.899 | 852.935.976.739 |
| 1 | Pembiayaan Utang | 351.853.256.250 | 1.006.400.481.800 |
| 1.1 | Surat Berharga Negara (Neto) | 389.322.045.700 | 549.550.000.000 |
| 1.2 | Pinjaman (Neto) | -37.468.789.450 | 6.956.379.407 |
| 1.2.1 | Pinjaman Dalam Negeri (Neto) | 1.296.006.236 | 1.296.006.236 |
| 1.2.1.1 | Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto) | 2.974.130.000 | 2.974.130.000 |
| 1.2.1.2 | Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri | -1.678.123.764 | -1.678.123.764 |
| 1.2.2 | Pinjaman Luar Negeri (Neto) | -38.764.795.686 | 5.660.373.171 |
| 1.2.2.1 | Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) | 48.350.415.817 | 111.529.539.837 |
| 1.2.2.1.1 | Pinjaman Tunai | 21.600.000.000 | 81.985.600.000 |
| 1.2.2.1.2 | Pinjaman Kegiatan | 26.750.415.817 | 29.543.939.837 |
| 1.2.2.1.2.1 | Pinjaman Kegiatan Pemerintah Pusat | 22.584.409.212 | 24.848.102.212 |
| 1.2.2.1.2.1.1 | Pinjaman Kegiatan Kementerian Negara/Lembaga | 22.182.739.212 | 22.182.739.212 |
| 1.2.2.1.2.1.2 | Pinjaman Kegiatan Diterushibahkan | 401.670.000 | 2.665.363.000 |
| 1.2.2.1.2.2 | Pinjaman Kegiatan kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah | 4.166.006.605 | 4.695.837.625 |
| 1.2.2.2 | Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri | -87.115.211.503 | -105.869.166.666 |

1.3 Pandemic . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN
RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan rupiah)

| | | SEMULA | MENJADI |
|----------|--|------------------------|-------------------------|
| 1.3 | Pandemic Bond | - | 449.894.102.393 |
| 2 | Pembiayaan Investasi | -74.229.874.207 | -229.324.135.317 |
| 2.1 | Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara | -17.730.801.073 | -15.980.801.073 |
| 2.1.1 | Penyertaan Modal Negara kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | -5.000.000.000 | -5.000.000.000 |
| 2.1.2 | Penyertaan Modal Negara kepada PT Hutama Karya (Persero) | -3.500.000.000 | -3.500.000.000 |
| 2.1.3 | Penyertaan Modal Negara kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) | -2.500.000.000 | -1.750.000.000 |
| 2.1.4 | Penyertaan Modal Negara kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) | -268.017.000 | -268.017.000 |
| 2.1.5 | Penyertaan Modal Negara kepada PT Geo Dipa Energi (Persero) | -700.000.000 | -700.000.000 |
| 2.1.6 | Penyertaan Modal Negara kepada PT Permodalan Nasional Madani (Persero) | -1.000.000.000 | -1.000.000.000 |
| 2.1.7 | Penyertaan Modal Negara kepada PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) | -3.762.784.073 | -3.762.784.073 |

2.1.8 Penyertaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan rupiah)

| | | SEMULA | MENJADI |
|---------|---|-----------------|-----------------|
| 2.1.8 | Penyertaan Modal Negara Untuk Penguatan Neraca Transaksi Berjalan | -1.000.000.000 | - |
| 2.2 | Investasi kepada Lembaga/Badan Lainnya | -5.000.000.000 | -5.000.000.000 |
| 2.2.1 | Penyertaan Modal Negara kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) | -5.000.000.000 | -5.000.000.000 |
| 2.3 | Investasi kepada Badan Layanan Umum | -52.514.582.699 | -41.014.582.699 |
| 2.3.1 | Dana Bergulir | -10.000.000.000 | -10.000.000.000 |
| 2.3.1.1 | Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) | -9.000.000.000 | -9.000.000.000 |
| 2.3.1.2 | Pusat Investasi Pemerintah (PIP) | -1.000.000.000 | -1.000.000.000 |
| 2.3.2 | Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) | -18.000.000.000 | -18.000.000.000 |
| 2.3.3 | Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) | -10.500.000.000 | - |
| 2.3.4 | Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) | -1.000.000.000 | - |
| 2.3.5 | Dana Abadi Penelitian | -5.000.000.000 | -5.000.000.000 |

2.3.6 Dana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuar. rupiah)

| | | SEMULA | MENJADI |
|-------|--|----------------|----------------|
| 2.3.6 | Dana Abadi Kebudayaan | -1.000.000.000 | -1.000.000.000 |
| 2.3.7 | Dana Abadi Perguruan Tinggi | -5.000.000.000 | -5.000.000.000 |
| 2.3.8 | Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) | -2.014.582.699 | -2.014.582.699 |
| 2.4 | Investasi kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional | -999.073.134 | -779.043.600 |
| 2.4.1 | Islamic Development Bank (IDB) | -83.767.003 | -101.800.177 |
| 2.4.2 | The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD) | -42.744.028 | -51.945.867 |
| 2.4.3 | International Fund for Agricultural Development (IFAD) | -43.200.000 | -52.500.000 |
| 2.4.4 | International Development Association (IDA) | -217.384.000 | -227.800.000 |
| 2.4.5 | International Finance Corporation (IFC) | -328.094.400 | - |
| 2.4.6 | International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) | -238.162.443 | -289.433.524 |

2.4.7. Credit . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

LAMPIRAN
RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan rupiah)

| | | SEMULA | MENJADI |
|----------|--|----------------------|----------------------|
| 2.4.7 | Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) | -43.200.000 | -52.500.000 |
| 2.4.8 | Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC) | -2.521.260 | -3.064.032 |
| 2.5 | Penerimaan Kembali Investasi | 2.014.582.699 | 2.014.582.699 |
| 2.5.1 | Dana Bergulir BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan | 2.014.582.699 | 2.014.582.699 |
| 2.6 | Pembiayaan Investasi Lainnya | - | -168.564.290.644 |
| 2.6.1 | Pembiayaan Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional | - | -150.000.000.000 |
| 2.6.2 | Pembiayaan Pendidikan | - | -18.564.290.644 |
| 3 | Pemberian Pinjaman | 5.192.999.856 | 5.810.213.256 |
| 3.1 | Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah/Lembaga/Badan Lainnya | 5.192.999.856 | 5.810.213.256 |
| 3.1.1 | Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah (Neto) | 5.192.999.856 | 5.810.213.256 |

3.1.1.1 Pinjaman . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

LAMPIRAN
RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan rupiah)

| | | SEMULA | MENJADI |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|
| 3.1.1.1 | Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah (Bruto) | -4.166.006.605 | -4.695.837.625 |
| 3.1.1.2 | Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman dari Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah | 9.359.006.461 | 10.506.050.881 |
| 4 | Kewajiban Penjaminan | -590.583.000 | -590.583.000 |
| 4.1 | Penjaminan Pemerintah | -590.583.000 | -590.583.000 |
| 4.1.1 | Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional | -421.066.000 | -421.066.000 |
| 4.1.1.1 | Penjaminan Pemerintah Untuk Percepatan Penyelenggaraan Light Rail Transit/LRT Jabodebek | -421.066.000 | -421.066.000 |
| 4.1.2 | Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN | -169.517.000 | -169.517.000 |
| 5 | Pembiayaan Lainnya | 25.000.000.000 | 70.640.000.000 |
| 5.1 | Saldo Anggaran Lebih | 25.000.000.000 | 70.640.000.000 |

1. Pendapatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

LAMPIRAN
RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan rupiah)

| No | Uraian | Semula | Menjadi |
|---------|---|-------------------|-------------------|
| 1. | Pendapatan Pajak Dalam Negeri | 1.823.100.176.382 | 1.427.004.588.832 |
| 1.1 | Pendapatan Pajak Penghasilan (PPH) | 929.902.819.000 | 703.344.111.452 |
| 1.1.1 | Pendapatan PPh Migas | 57.426.030.000 | 43.746.340.645 |
| 1.1.1.1 | Pendapatan PPh Minyak Bumi | 26.429.041.606 | 20.133.501.681 |
| 1.1.1.2 | Pendapatan PPh Gas Bumi | 30.996.988.394 | 23.613.338.964 |
| 1.1.2 | Pendapatan PPh Non-Migas | 872.476.789.000 | 659.597.270.807 |
| 1.1.2.1 | Pendapatan PPh Pasal 21 | 163.371.370.000 | 139.035.184.804 |
| 1.1.2.2 | Pendapatan PPh Pasal 22 | 22.927.289.000 | 19.771.134.434 |
| 1.1.2.3 | Pendapatan PPh Pasal 22 Impor | 69.672.450.000 | 48.942.385.366 |
| 1.1.2.4 | Pendapatan PPh Pasal 23 | 52.746.585.000 | 39.095.007.498 |
| 1.1.2.5 | Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi | 11.976.351.000 | 10.575.768.372 |
| 1.1.2.6 | Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan | 323.416.731.000 | 231.951.019.874 |
| 1.1.2.7 | Pendapatan PPh Pasal 26 | 74.934.345.000 | 51.444.376.435 |
| 1.1.2.8 | Pendapatan PPh Final | 153.251.005.000 | 118.661.094.587 |
| 1.1.2.9 | Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya | 180.663.000 | 120.299.437 |
| 1.2 | Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah | 685.874.886.800 | 529.651.102.000 |

1.2.1 Pendapatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

LAMPIRAN
RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan rupiah)

| No | Uraian | Semula | Menjadi |
|-------|---|-----------------|-----------------|
| 1.2.1 | Pendapatan PPN Dalam Negeri | 426.243.449.062 | 344.504.286.205 |
| 1.2.2 | Pendapatan PPN Impor | 237.935.957.503 | 169.931.099.956 |
| 1.2.3 | Pendapatan PPN Lainnya | 119.548.477 | 107.907.335 |
| 1.2.4 | Pendapatan PPnBM Dalam Negeri | 16.332.176.818 | 10.397.823.954 |
| 1.2.5 | Pendapatan PPnBM Impor | 5.243.754.940 | 4.709.984.550 |
| 1.3 | Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan | 18.864.632.582 | 13.441.937.380 |
| 1.3.1 | Pendapatan PBB Perkebunan | 2.123.330.882 | 1.512.973.053 |
| 1.3.2 | Pendapatan PBB Perhutanan | 733.648.366 | 522.758.943 |
| 1.3.3 | Pendapatan PBB Pertambangan | 1.667.153.334 | 1.187.925.109 |
| 1.3.4 | Pendapatan PBB Migas | 13.938.000.000 | 9.931.480.107 |
| 1.3.5 | Pendapatan PBB Panas Bumi | 363.100.000 | 258.725.816 |
| 1.3.6 | Pendapatan PBB Lainnya | 39.400.000 | 28.074.352 |
| 1.4 | Pendapatan Cukai | 180.530.000.000 | 172.898.640.000 |
| 1.4.1 | Pendapatan Cukai Hasil Tembakau | 173.145.600.000 | 165.645.600.000 |
| 1.4.2 | Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol | 154.600.000 | 154.600.000 |
| 1.4.3 | Pendapatan Minuman Mengandung Ethyl Alkohol | 7.130.800.000 | 7.098.440.000 |
| 1.5 | Pendapatan Pajak Lainnya | 7.927.838.000 | 7.668.898.000 |
| 2. | Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional | 42.602.640.000 | 35.625.000.000 |
| 2.1 | Pendapatan Bea Masuk | 40.002.070.000 | 33.875.000.000 |

2.2 Pendapatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

LAMPIRAN
RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan rupiah)

| No | Uraian | Semula | Menjadi |
|-------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 2.2 | Pendapatan Bea Keluar | 2.600.570.000 | 1.750.000.000 |
| TOTAL | | 1.865.702.816.382 | 1.462.629.688.832 |

| Memorandum Item: | Semula | Menjadi |
|---|----------------|----------------|
| Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) terdiri atas: | | |
| 1. Pajak Penghasilan (PPh) | 11.542.556.273 | 20.145.686.273 |
| a. Komoditas Panas Bumi | 2.289.521.634 | 2.289.521.634 |
| b. Bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam Penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal | 9.249.770.944 | 9.249.770.944 |
| c. Penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari pemberian pinjaman, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum | 2.960.557 | 2.960.557 |
| d. Pembayaran <i>Recurrent Cost</i> SPAN yang dibiayai oleh rupiah murni | 303.138 | 303.138 |
| e. PPh Pasal 21 selama 6 bulan (April s.d. September 2020) atas penghasilan dari pegawai s.d. Rp 200 juta (disetahunkan) yang bekerja di sektor Industri Pengolahan (Kategori C) | 0 | 8.603.130.000 |
| 2. Bea Masuk | 694.100.000 | 405.574.336 |
| 3. Tambahan DTP Pajak dan Bea Masuk | 0 | 64.000.000.000 |

PENERIMAAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

LAMPIRAN
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan rupiah)

| KODE (1) | URAIAN AKUN (2) | SEMULA (3) | MENJADI (4) |
|-------------|---|------------------------|------------------------|
| | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | 366.995.145.278 | 297.755.472.298 |
| A | PNBP SUMBER DAYA ALAM (SDA) | 160.358.258.585 | 82.225.908.748 |
| | SDA MIGAS | 127.313.220.000 | 53.294.922.943 |
| | - Minyak Bumi | 96.807.720.000 | 40.385.879.343 |
| | - Gas Bumi | 30.505.500.000 | 12.909.043.600 |
| | SDA Non MIGAS | 33.045.038.585 | 28.930.985.805 |
| | - Pertambangan Mineral dan Batu Bara | 26.209.094.486 | 22.134.087.862 |
| | - Pendapatan Kehutanan | 4.738.942.055 | 4.417.574.264 |
| | - Pendapatan Perikanan | 900.354.236 | 900.354.236 |
| | - Pendapatan Pertambangan Panas Bumi | 1.196.647.807 | 1.478.969.443 |
| B | PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN (KND) | 49.000.000.000 | 65.000.000.000 |
| C | PNBP LAINNYA | 100.945.313.169 | 94.738.807.084 |
| 001 | Majelis Permusyawaratan Rakyat | 143.226 | 143.226 |
| 002 | Dewan Perwakilan Rakyat | 2.119.117 | 5.903.877 |
| 004 | Badan Pemeriksa Keuangan | 5.823.596 | 8.995.794 |
| 005 | Mahkamah Agung | 48.740.838 | 75.439.089 |
| 006 | Kejaksaan Republik Indonesia | 556.815.787 | 556.815.787 |
| 007 | Kementerian Sekretariat Negara | 2.243.979 | 2.243.979 |
| 010 | Kementerian Dalam Negeri | 58.595.464 | 58.933.260 |
| 011 | Kementerian Luar Negeri | 557.531.250 | 557.531.250 |
| 012 | Kementerian Pertahanan | 2.977.008.247 | 2.977.008.246 |
| 013 | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 3.525.464.812 | 3.878.011.293 |
| 015 | Kementerian Keuangan | 689.656.335 | 689.656.334 |
| 018 | Kementerian Pertanian | 251.740.412 | 250.065.352 |
| 019 | Kementerian Perindustrian | 153.015.177 | 176.392.400 |
| 020 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 19.267.459.561 | 14.877.979.367 |
| | - Pendapatan Penjualan Hasil Tambang | 18.185.921.495 | 13.796.441.301 |
| | - PNBP Lainnya | 1.081.538.066 | 1.081.538.066 |

022 Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

LAMPIRAN
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan rupiah)

| KODE (1) | URAIAN AKUN (2) | SEMULA (3) | MENJADI (4) |
|-------------|---|---------------|----------------|
| 022 | Kementerian Perhubungan | 7.286.401.110 | 7.193.593.502 |
| 023 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 25.615.161 | 2.513.387.650 |
| 024 | Kementerian Kesehatan | 571.526.618 | 556.486.669 |
| 025 | Kementerian Agama | 1.791.132.308 | 1.824.907.926 |
| 026 | Kementerian Ketenagakerjaan | 1.001.774.238 | 1.001.774.238 |
| 027 | Kementerian Sosial | 10.415.252 | 583.041.050 |
| 029 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 155.660.104 | 155.660.104 |
| 032 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 144.634.026 | 144.634.026 |
| 033 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 56.336.238 | 600.050.000 |
| 034 | Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan | - | 60.432 |
| 035 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | - | 71.399 |
| 036 | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | - | 462.891 |
| 040 | Kementerian/Badan Pariwisata dan ekonomi kreatif | 48.373.476 | 54.847.782 |
| 041 | Kementerian Badan Usaha Milik Negara | 4.419.730 | 5.852.310 |
| 042 | Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset Nasional | 2.338.321.219 | 5.126.737 |
| 044 | Kementerian Koperasi dan UKM | 966.087 | 966.087 |
| 047 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 51.051 | 891.000 |
| 048 | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | - | 135.436 |
| 050 | Badan Intelijen Negara | - | 281.109 |
| 051 | Badan Siber dan Sandi Negara | - | 49 |
| 054 | Badan Pusat Statistik | 28.914.845 | 28.914.845 |

055 Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

LAMPIRAN
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan rupiah)

| KODE (1) | URAIAN AKUN (2) | SEMULA (3) | MENJADI (4) |
|-------------|---|----------------|----------------|
| 055 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional | 625.000 | 1.756.459 |
| 056 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN | 2.364.508.775 | 2.132.254.387 |
| 057 | Perpustakaan Nasional | 985.600 | 1.278.697 |
| 059 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | 17.536.179.438 | 18.252.107.753 |
| 060 | Kepolisian Republik Indonesia | 10.392.416.919 | 7.847.227.537 |
| 063 | Badan Pengawas Obat dan Makanan | 137.000.000 | 137.000.000 |
| 064 | Lembaga Ketahanan Nasional | 271.679 | 1.286.261 |
| 065 | Badan Koordinasi Penanaman Modal | - | 84.468 |
| 066 | Badan Narkotika Nasional | - | 1.122.286 |
| 068 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | 138.915 | 876.183 |
| 074 | Komisi Nasional HAM | - | 116.765 |
| 075 | Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika | 110.151.740 | 110.151.740 |
| 076 | Komisi Pemilihan Umum | - | 26.344.637 |
| 077 | Mahkamah Konstitusi RI | 1.310.346 | 1.310.346 |
| 078 | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | - | 71.119 |
| 079 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | 71.065.526 | 71.065.526 |
| 080 | Badan Tenaga Nuklir Nasional | 26.071.925 | 26.071.925 |
| 081 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | 107.089.707 | 107.089.707 |
| 082 | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional | - | 10.644.403 |
| 083 | Badan Informasi Geospasial | 15.487.500 | 15.487.500 |
| 084 | Badan Standardisasi Nasional | 34.745.720 | 34.730.520 |
| 085 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir | 10.790.055 | 10.790.055 |
| 086 | Lembaga Administrasi Negara | 73.160.056 | 73.160.056 |
| 087 | Arsip Nasional RI | 16.760.790 | 16.760.790 |
| 088 | Badan Kepegawaian Negara | 10.231.920 | 10.231.920 |
| 089 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | 39.754.000 | 38.958.920 |

090 Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

LAMPIRAN
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan rupiah)

| KODE (1) | URAIAN AKUN (2) | SEMULA (3) | MENJADI (4) |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 090 | Kementerian Perdagangan | 87.346.526 | 91.713.852 |
| 092 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | 1.256.327 | 1.243.763 |
| 093 | Komisi Pemberantasan Korupsi | 92.408.862 | 92.408.862 |
| 095 | Dewan Perwakilan Daerah | - | 4.252.123 |
| 100 | Komisi Yudisial RI | 78.157 | 78.157 |
| 103 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana | 735.250 | 22.190.469 |
| 106 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | - | 50.321 |
| 107 | Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan | - | 56.364 |
| 108 | Komisi Pengawas Persaingan Usaha | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 109 | Badan Pengembangan Wilayah Suramadu | - | 6.589 |
| 113 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | - | 695.384 |
| 114 | Sekretariat Kabinet | - | 1.554.302 |
| 115 | Badan Pengawas Pemilu | - | 1.406.097 |
| 116 | Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia | 20.892.308 | 20.892.308 |
| 117 | Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia | 132.220.863 | 125.220.862 |
| 118 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang | - | 423.663 |
| 120 | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman | - | 167.292 |
| 999 | Bendaharawan Umum Negara | 28.088.730.000 | 26.650.202.194 |
| | - Pendapatan Minyak Mentah (DMO) | 7.302.730.000 | 3.119.012.813 |
| | - PNBP Lainnya | 20.786.000.000 | 23.531.189.381 |
| D | PNBP Badan Layanan Umum | 56.691.573.524 | 55.790.756.466 |

1 001 MAJELIS . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

**LAMPIRAN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT ORGANISASI / BAGIAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2020**

(dalam ribuan rupiah)

| No. | KODE BA | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | APBN 2020 | |
|-----|------------|---|-----------------|-----------------|
| | | | Semula | Menjadi |
| 1 | 001 | MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT | 603.670.269 | 576.139.182 |
| 2 | 002 | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT | 5.118.911.439 | 4.897.999.780 |
| 3 | 004 | BADAN PEMERIKSA KEUANGAN | 3.537.736.904 | 3.457.674.941 |
| 4 | 005 | MAHKAMAH AGUNG | 10.597.927.977 | 10.144.409.658 |
| 5 | 006 | KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA | 7.072.505.795 | 6.031.143.712 |
| 6 | 007 | KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA | 2.022.092.613 | 1.809.835.170 |
| 7 | 010 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | 3.442.014.970 | 2.651.114.970 |
| 8 | 011 | KEMENTERIAN LUAR NEGERI | 8.686.008.341 | 7.815.508.672 |
| 9 | 012 | KEMENTERIAN PERTAHANAN | 131.182.597.806 | 122.447.750.368 |
| 10 | 013 | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI | 13.846.453.723 | 13.405.453.723 |
| 11 | 015 | KEMENTERIAN KEUANGAN | 43.511.223.211 | 40.934.582.969 |
| 12 | 018 | KEMENTERIAN PERTANIAN | 21.055.309.526 | 17.442.754.654 |
| 13 | 019 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | 2.952.007.554 | 2.377.577.972 |
| 14 | 020 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 9.666.330.480 | 7.473.303.000 |
| 15 | 022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | 43.111.911.239 | 36.984.775.822 |
| 16 | 023 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 36.301.176.353 | 70.718.123.434 |
| 17 | 024 | KEMENTERIAN KESEHATAN | 57.399.996.028 | 76.545.874.870 |
| 18 | 025 | KEMENTERIAN AGAMA | 65.060.948.695 | 62.411.389.983 |
| 19 | 026 | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN | 6.909.858.970 | 5.490.140.992 |
| 20 | 027 | KEMENTERIAN SOSIAL | 62.767.643.594 | 60.686.767.230 |
| 21 | 029 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 9.319.325.816 | 7.736.642.116 |
| 22 | 032 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | 6.448.661.749 | 5.300.705.838 |

23 033 KEMENTERIAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

LAMPIRAN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT ORGANISASI / BAGIAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan rupiah)

| No. | KODE BA | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | APBN 2020 | |
|-----|------------|--|-----------------|----------------|
| | | | Semula | Menjadi |
| 23 | 033 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | 120.217.535.952 | 95.683.763.141 |
| 24 | 034 | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN | 282.769.824 | 268.970.603 |
| 25 | 035 | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN | 409.357.649 | 393.334.438 |
| 26 | 036 | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN | 242.204.739 | 232.623.827 |
| 27 | 040 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 4.477.200.491 | 4.269.731.201 |
| 28 | 041 | KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA | 345.832.707 | 315.338.445 |
| 29 | 042 | KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL | 42.166.911.542 | 2.472.047.757 |
| 30 | 044 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH | 972.337.202 | 743.245.531 |
| 31 | 047 | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 273.641.802 | 246.289.533 |
| 32 | 048 | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | 304.310.198 | 246.366.346 |
| 33 | 050 | BADAN INTELIJEN NEGARA | 7.427.517.623 | 5.592.440.617 |
| 34 | 051 | BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA | 2.206.308.572 | 1.327.035.771 |

35 052 DEWAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

LAMPIRAN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT ORGANISASI / BAGIAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan rupiah)

| No. | KODE BA | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | APBN 2020 | |
|-----|------------|---|-----------------|----------------|
| | | | Semula | Menjadi |
| 35 | 052 | DEWAN KETAHANAN NASIONAL | 46.769.195 | 46.285.830 |
| 36 | 054 | BADAN PUSAT STATISTIK | 7.927.750.271 | 4.641.097.503 |
| 37 | 055 | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | 1.828.689.846 | 1.394.030.312 |
| 38 | 056 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL | 10.096.979.235 | 9.187.313.981 |
| 39 | 057 | PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA | 658.997.123 | 552.299.925 |
| 40 | 059 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5.610.505.496 | 5.132.087.935 |
| 41 | 060 | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | 104.697.223.353 | 96.119.921.082 |
| 42 | 063 | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN | 1.916.726.169 | 1.544.407.583 |
| 43 | 064 | LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL | 204.233.517 | 189.431.030 |
| 44 | 065 | BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL | 585.471.934 | 452.051.127 |
| 45 | 066 | BADAN NARKOTIKA NASIONAL | 1.762.750.020 | 1.678.341.024 |
| 46 | 067 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI | 3.497.804.895 | 2.984.999.136 |
| 47 | 068 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL | 3.581.554.060 | 3.172.994.896 |
| 48 | 074 | KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA | 104.058.932 | 100.312.787 |
| 49 | 075 | BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA | 3.056.259.932 | 2.475.621.633 |
| 50 | 076 | KOMISI PEMILIHAN UMUM | 2.159.511.595 | 1.879.908.342 |

51 077 MAHKAMAH . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

LAMPIRAN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT ORGANISASI / BAGIAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan rupiah)

| No. | KODE BA | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | APBN 2020 | |
|-----|------------|---|---------------|---------------|
| | | | Semula | Menjadi |
| 51 | 077 | MAHKAMAH KONSTITUSI RI | 246.215.842 | 221.071.506 |
| 52 | 078 | PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN | 216.641.414 | 204.291.875 |
| 53 | 079 | LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA | 1.677.743.054 | 1.583.768.181 |
| 54 | 080 | BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL | 710.673.109 | 715.802.416 |
| 55 | 081 | BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI | 2.039.572.705 | 1.636.012.451 |
| 56 | 082 | LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL | 916.605.926 | 746.795.079 |
| 57 | 083 | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | 811.539.501 | 611.250.366 |
| 58 | 084 | BADAN STANDARISASI NASIONAL | 286.291.692 | 265.514.646 |
| 59 | 085 | BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR | 126.644.533 | 116.155.670 |
| 60 | 086 | LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA | 338.732.136 | 305.044.603 |
| 61 | 087 | ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA | 190.757.216 | 178.979.768 |
| 62 | 088 | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA | 642.859.585 | 580.777.126 |
| 63 | 089 | BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | 1.860.968.834 | 1.483.775.722 |
| 64 | 090 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN | 3.577.137.901 | 2.802.951.136 |

65 092 KEMENTERIAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

LAMPIRAN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT ORGANISASI / BAGIAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan rupiah)

| No. | KODE BA | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | APBN 2020 | |
|-----|------------|--|---------------|---------------|
| | | | Semula | Menjadi |
| 65 | 092 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | 1.738.476.155 | 1.468.207.337 |
| 66 | 093 | KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI | 922.575.256 | 859.975.256 |
| 67 | 095 | DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) | 932.014.029 | 899.729.904 |
| 68 | 100 | KOMISI YUDISIAL RI | 102.475.540 | 91.579.788 |
| 69 | 103 | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | 700.646.814 | 679.814.048 |
| 70 | 104 | BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA | 322.004.033 | 296.001.597 |
| 71 | 106 | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | 169.675.434 | 154.951.480 |
| 72 | 107 | BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS) | 2.253.647.651 | 1.815.640.233 |
| 73 | 108 | KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA | 130.338.589 | 117.841.861 |
| 74 | 109 | BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU | 215.921.503 | 189.881.016 |
| 75 | 110 | OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA | 166.309.152 | 153.900.955 |
| 76 | 111 | BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN | 245.697.974 | 213.002.832 |
| 77 | 112 | BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM | 2.226.885.004 | 2.075.282.538 |

78 113 BADAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

LAMPIRAN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT ORGANISASI / BAGIAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan rupiah)

| No. | KODE BA | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | APBN 2020 | |
|-------------------------------------|------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | Semula | Menjadi |
| 78 | 113 | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME | 516.942.029 | 440.818.091 |
| 79 | 114 | SEKRETARIAT KABINET | 296.559.039 | 274.578.071 |
| 80 | 115 | BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM | 2.953.042.603 | 1.573.240.603 |
| 81 | 116 | LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | 1.313.186.693 | 1.075.756.201 |
| 82 | 117 | LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | 1.107.952.086 | 996.062.655 |
| 83 | 118 | BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG | 144.558.489 | 129.409.782 |
| 84 | 119 | BADAN KEAMANAN LAUT | 465.729.381 | 442.605.503 |
| 85 | 120 | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI | 271.543.385 | 259.596.417 |
| 86 | 121 | BADAN EKONOMI KREATIF | 889.661.172 | - |
| 87 | 122 | BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP) | 216.998.054 | 193.123.334 |
| BENDAHARA UMUM NEGARA BA 999 | | | 773.856.428.696 | 1.014.565.858.350 |
| BELANJA PEMERINTAH PUSAT | | | 1.683.477.179.135 | 1.851.101.008.789 |

TRANSFER . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

**LAMPIRAN
RINCIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

(dalam ribuan rupiah)

| URAIAN | Semula | Menjadi |
|--|------------------------|------------------------|
| TRANSFER KE DAERAH | 784.945.321.424 | 691.528.869.080 |
| I. Dana Perimbangan | 747.196.825.424 | 657.152.141.384 |
| A. Dana Transfer Umum | 544.670.877.029 | 474.193.446.384 |
| 1. Dana Bagi Hasil (DBH) | 117.580.294.554 | 89.811.922.157 |
| a. DBH Pajak | 56.231.028.325 | 45.846.167.132 |
| i. Pajak Penghasilan | 35.069.544.200 | 29.922.190.635 |
| ii. PBB | 17.698.572.125 | 12.611.064.497 |
| iii. Cukai Hasil Tembakau | 3.462.912.000 | 3.312.912.000 |
| b. DBH Sumber Daya Alam | 48.844.766.229 | 31.461.255.025 |
| i. Migas | 24.309.374.100 | 10.197.069.596 |
| ii. Pertambangan Mineral dan Batu Bara | 20.967.275.588 | 17.707.270.290 |
| iii. Kehutanan | 1.890.514.908 | 1.653.456.196 |
| iv. Perikanan | 720.283.388 | 720.283.389 |
| v. Panas Bumi | 957.318.245 | 1.183.175.554 |
| c. Pembayaran Kurang Bayar DBH | 12.504.500.000 | 12.504.500.000 |
| 2. Dana Alokasi Umum (DAU) | 427.090.582.475 | 384.381.524.227 |
| a. DAU Murni Formula | 418.707.900.000 | 377.763.917.428 |
| b. DAU Tambahan | 8.382.682.475 | 6.617.606.799 |
| B. Dana Transfer Khusus | 202.525.948.395 | 182.958.695.000 |
| 1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 72.249.800.000 | 54.187.350.000 |
| 2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik | 130.276.148.395 | 128.771.345.000 |
| a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) | 54.315.611.400 | 53.459.118.000 |
| b. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD | 4.475.500.000 | 4.014.724.000 |
| c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 1.477.200.000 | 1.195.308.000 |

d. Tunjangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

**LAMPIRAN
RINCIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

(dalam ribuan rupiah)

| URAIAN | Semula | Menjadi |
|--|------------------------|------------------------|
| d. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD | 53.836.281.140 | 50.881.143.000 |
| e. Tambahan Penghasilan Guru (TAMSIL) PNSD | 698.325.855 | 454.204.000 |
| f. Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD di Daerah Khusus | 2.063.730.000 | 1.985.007.000 |
| g. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya | 141.700.000 | 136.032.000 |
| h. Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOK & BOKB) | 11.676.000.000 | 15.297.306.000 |
| i. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM) | 200.000.000 | 192.000.000 |
| j. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan | 1.001.310.000 | 961.258.000 |
| k. Dana Pelayanan Kepariwisata | 284.300.000 | 142.150.000 |
| l. Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) | 106.190.000 | 53.095.000 |
| II. Dana Insentif Daerah | 15.000.000.000 | 13.500.000.000 |
| III. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta | 22.748.496.000 | 20.876.727.696 |
| A. Dana Otonomi Khusus | 21.428.496.000 | 19.556.727.696 |
| 1. Dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat | 8.374.158.000 | 7.555.278.348 |
| 2. Dana Otsus Provinsi Aceh | 8.374.158.000 | 7.555.278.348 |
| 3. Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otsus | 4.680.180.000 | 4.446.171.000 |
| B. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta | 1.320.000.000 | 1.320.000.000 |
| DANA DESA | 72.000.000.000 | 71.190.000.000 |
| J U M L A H | 856.945.321.424 | 762.718.869.080 |

1. Anggaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

LAMPIRAN
RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan rupiah)

| NO | KOMPONEN ANGGARAN PENDIDIKAN | Semula | Menjadi |
|-----------|--|------------------------|------------------------|
| 1. | Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat | 172.226.896.771 | 191.602.387.535 |
| 1.1 | Anggaran Pendidikan pada Kementerian Negara/Lembaga | 155.693.152.771 | 145.068.643.535 |
| 1.1.1 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 36.301.176.353 | 70.718.123.434 |
| 1.1.2 | Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional | 41.451.368.911 | 1.818.985.215 |
| 1.1.3 | Kementerian Agama | 54.970.180.057 | 52.731.560.388 |
| 1.1.4 | Kementerian Keuangan | 2.238.780.066 | 2.354.151.844 |
| 1.1.5 | Kementerian Pertanian | 681.155.494 | 564.286.559 |
| 1.1.6 | Kementerian Perindustrian | 1.044.000.000 | 840.848.594 |
| 1.1.7 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 105.000.000 | 295.718.185 |
| 1.1.8 | Kementerian Perhubungan | 3.644.807.734 | 3.126.801.691 |
| 1.1.9 | Kementerian Kesehatan | 1.750.000.000 | 1.660.849.959 |
| 1.1.10 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 109.375.000 | 90.800.048 |
| 1.1.11 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 450.000.000 | 485.689.268 |
| 1.1.12 | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 1.105.100.000 | 892.991.286 |
| 1.1.13 | Badan Tenaga Nuklir Nasional | 32.834.204 | 33.071.186 |
| 1.1.14 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | 441.278.066 | 534.657.815 |
| 1.1.15 | Kementerian Pertahanan | 723.400.000 | 174.774.923 |
| 1.1.16 | Kementerian Ketenagakerjaan | 4.800.162.954 | 3.813.908.723 |
| 1.1.17 | Perpustakaan Nasional Republik Indonesia | 401.219.943 | 375.836.980 |
| 1.1.18 | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 117.600.000 | 89.892.348 |
| 1.1.19 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | 108.626.989 | 99.364.177 |
| 1.1.20 | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 178.520.000 | 196.638.623 |
| 1.1.21 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 4.482.067.000 | 3.657.855.496 |

1.1.22 Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

LAMPIRAN
RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan rupiah)

| NO | KOMPONEN ANGGARAN PENDIDIKAN | Semula | Menjadi |
|-----------|---|------------------------|------------------------|
| 1.1.22 | Kementerian Perdagangan | 6.500.000 | 6.895.448 |
| 1.1.23 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | 550.000.000 | 504.941.343 |
| 1.2 | Anggaran Pendidikan pada BA BUN | 16.533.744.000 | 46.533.744.000 |
| 2. | Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa | 306.857.607.540 | 283.597.297.395 |
| 2.1 | DTU yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan | 166.914.664.145 | 150.224.664.145 |
| 2.2 | Dana Transfer Khusus | 135.992.948.395 | 129.809.737.760 |
| 2.2.1 | DAK Fisik | 18.784.600.000 | 17.492.201.760 |
| 2.2.2 | DAK Non Fisik | 117.208.348.395 | 112.317.536.000 |
| 2.2.2.1 | Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD | 53.836.281.140 | 50.881.143.000 |
| 2.2.2.2 | Tambahan Penghasilan Guru PNSD | 698.325.855 | 454.204.000 |
| 2.2.2.3 | Bantuan Operasional Sekolah | 54.315.611.400 | 53.459.118.000 |
| 2.2.2.4 | Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD | 4.475.500.000 | 4.014.724.000 |
| 2.2.2.5 | Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM | 200.000.000 | 192.000.000 |
| 2.2.2.6 | Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan | 1.477.200.000 | 1.195.308.000 |
| 2.2.2.7 | Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman budaya | 141.700.000 | 136.032.000 |
| 2.2.2.8 | Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus | 2.063.730.000 | 1.985.007.000 |
| 2.3 | Otsus yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan | 3.949.995.000 | 3.562.895.490 |
| 3. | Anggaran Pendidikan melalui Pembiayaan | 29.000.000.000 | 47.564.290.644 |
| 3.1 | Dana Pengembangan Pendidikan Nasional | 18.000.000.000 | 18.000.000.000 |
| 3.2 | Dana Abadi Penelitian | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 |

3.3 Dana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

LAMPIRAN
RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan rupiah)

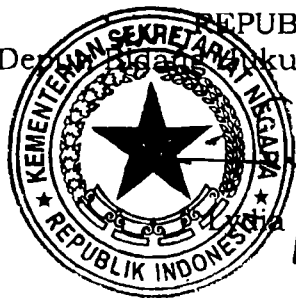
| NO | KOMPONEN ANGGARAN PENDIDIKAN | Semula | Menjadi |
|-----|------------------------------|------------------------|------------------------|
| 3.3 | Dana Abadi Kebudayaan | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| 3.4 | Dana Abadi Perguruan Tinggi | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 |
| 3.5 | Pembiayaan Pendidikan | - | 18.564.290.644 |
| | Jumlah | 508.084.504.311 | 522.763.975.574 |

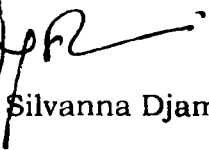
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Departemen Hukum dan Perundang-undangan,




Lydia Silvanna Djaman